

Judul : BPIH Ditentukan Hari Ini
Tanggal : Rabu, 13 April 2022
Surat Kabar : Republika
Halaman : 7

BPIH Ditentukan Hari Ini

Dewan mengusulkan masa reses bisa menggelar sidang membahas masalah haji.

■ ZAHROTUL OKTAVIANI, ALI YUSUF

JAKARTA — Pemerintah bersama Komisi VIII DPR akan menentukan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), sekaligus Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) pada hari ini. Besaran BPIH akan disesuaikan dengan kuota jamaah yang akan diberangkatkan pada Haji 2022.

"Ditunggu besok (hari ini -red) ketok" palunya, karena kita terus melakukan pembahasan. Mengingat jamaah haji tahun ini ditentukan oleh Saudi sebanyak satu juta, kemungkinan Indonesia mendapat kuota 100 persen kecil," Kepala Subdirektorat Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama (Kemenag), Noer Alya Fitra, saat dihubungi *Republika*, Selasa (12/4).

Sebelum pandemi Covid-19, pelaksanaan haji diikuti oleh 2,5 juta jamaah dari seluruh dunia, termasuk jamaah dari Arab Saudi. Melihat kondisi saat ini, Fitra memprediksi, alternatif skema yang kemungkinan besar terjadi hanya 50 persen dari kuota normal.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief mengatakan, saat ini Kemenag bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Komisi VIII DPR yang tergabung dalam Panja BPIH sedang menghitung kembali komponen BPIH. BPIH terdiri atas dua unsur. Pertama, biaya yang berasal dari nilai

manfaat. Kedua, Bipih, yakni biaya yang dibayarkan oleh jamaah haji.

Untuk menetapkan besaran BPIH, Kemenag masih membutuhkan data-data yang lebih pasti, salah satunya jumlah hari jamaah menetap di Arab Saudi. Berbeda dengan dulu yang totalnya 42 hari, untuk ibadah haji sekarang kemungkinan hanya akan separuhnya.

"Maka ada kemungkinan komponen biayanya menurun, kita menunggu yang seperti itu. Mudah-mudahan infonya segera muncul," ujar dia.

Perhitungan ulang komponen BPIH disebut perlu dilakukan, mengingat adanya perubahan besaran anggaran yang dibutuhkan. Hal ini mulai dari biaya pesawat, konsumsi, dan akomodasi, supaya lebih rasional dan efisien.

"Ini berkaitan dengan angka. Perlu perhitungan mendetail. Pesawatnya seperti apa, avturnya naik apa *nggak*, pajak yang berlaku di Saudi dan Indonesia seperti apa, biaya hotel saat ini yang berlaku di sana berapa, biaya makanan yang biasanya normal-normal saja kemudian kalau harga minyak naik jadinya bagaimana," ujar Hilman.

Hilman menambahkan, Kemenag juga sudah menyiapkan skenario biaya perjalanan ibadah haji, tergantung jumlah jamaah yang berangkat, apakah 50 persen, 40 persen, atau 35 persen. Hingga saat ini, kuota setiap negara belum diputuskan oleh Pemerintah Arab Saudi.

Kuota haji khusus

Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umroh (Forum SATHU) mengusulkan, jika Indonesia mendapat kuota 100 ribu jamaah, 10 ribu di antaranya bisa diberikan untuk haji khusus. Forum SATHU berharap, usulannya itu disetujui Pemerintah Indonesia dan Saudi.

"Inisiasi Forum SATHU dari satu juta kuota haji, 100 ribu bagi jamaah haji Indonesia dan 10 ribunya untuk haji khusus," kata Sekjen Forum SATHU Artha Hanif.

Kepala BPKH Anggito Abimanyu menyatakan kesanggupannya jika kuota haji Indonesia sampai 100 ribu jamaah. "Kami adalah pelaksana tugas dari aspek pemenuhan biaya haji yang ditetapkan Kemenag dan DPR, berapa pun jumlah kuota dan besaran biayanya, kami siap memenuhinya," kata Anggito.

Namun, Fitra mengatakan, pembagian kuota antara jamaah haji reguler dan khusus sudah ditetapkan undang-undang. Berdasarkan UU yang ada, menurut dia, kuota haji khusus sekitar 8 persen dari kuota

nasional yang diberikan.

Fitra menambahkan, berdasarkan kebijakan yang sebelumnya dikeluarkan Kerajaan Saudi, pelaksanaan ibadah haji tahun ini tidak diperbolehkan bagi umat Muslim yang usianya di atas 65 tahun. Namun, penjelasan teknis untuk hal tersebut juga masih belum diinformasikan.

"Aturan ini memang sudah kebijakannya Saudi, kita tidak mungkin untuk menawar. Perlu diingat, kita belum tahu teknisnya seperti apa, batas usia 65 tahun ini hitungannya sejak kapan masih belum dijelaskan," kata dia.

Fitra menyebut Kemenag masih menunggu regulasi teknis lebih lanjut dari Arab Saudi terkait aturan usia itu. Apakah nantinya batas usia 65 tahun ke atas tidak boleh melaksanakan haji sama sekali tanpa toleransi, atau ada penjelasan lainnya.

"Kalaupun seandainya nanti ada yang dikeluarkan dari daftar keberangkatan karena syarat *isthita'ah*, yang mengisi adalah nomor porsi di bawahnya, yang memeneuhi kriteria. Jadi tidak ada yang dizalimi," ujar dia.

Anggota Komisi VIII DPR, Muhammad Ali Ridha, mengusulkan agar pada masa reses yang berakhir 14 April, Panja Haji bisa menggelar sidang membahas masalah haji. Persoalan haji perlu dibahas panja dalam waktu dekat karena waktu persiapan yang semakin mepet.

"Kita nanti akan usulkan kepada pimpinan DPR untuk memberikan kesempatan kita mengadakan rapat terakhir. Insya Allah kita akan maraton dalam pembicaraan panja haji walaupun nanti tanggal 14 ini kalau tidak salah sudah memasuki masa reses," kata Ali Ridha. ■ *ed: mas alimul huda*



Berapa pun jumlah kuota dan besaran biayanya, kami siap memenuhinya.

Anggito Abimanyu
Kepala BPKH